

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 1999 dan 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman (Edi, 2014).

Disini bisa dikatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 dan 2004 ideal karena pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dicalonkan oleh partai politik ataupun gabungan parpol, selanjutnya adalah munculnya lembaga baru bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang sebelumnya tidak ada, sehingga akan menimbulkan konsekwensi dan hukum dimasa yang akan datang, tetapi juga mempunyai dampak yaitu akan munculnya oposisi karena pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dua putaran karena setiap calon harus memiliki suara diatas 35 persen (Edi, 2014).

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Dalam konteks penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran

berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau civil education. Aktualisasi dari civil education sebenarnya terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat? Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat? Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. (Edi, 2014).

Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan menuju demokrasi Indonesia yang lebih baik, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu sejak tahun 1999 dan pilkada tahun 2005 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politikpun makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Edi, 2014)

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat

pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat (Edi, 2014).

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Edi, 2014)

Pada penelitian ini agar lebih obyektif, maka peneliti memilih Desa Urung Purba Kecamatan Purba sebagai tempat penelitian yang mana penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Berdasarkan fakta dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun”.

1.2. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah harus diperhatikan supaya masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul, merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induksi. Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini masalah yang harus diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada.

1.3. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah merupakan batasan – batasan masalah yang sengaja di buat agar pembahasana yang akan di bahasa tidak terlalu luas, oleh karena itu mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan tersebut dan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan serta kekeliruan dalam pembahasan penelitian ini, maka ada batasan masalah yang mejadikan penelitian ini lebih efektif dan efesien.

Dalam melakukan penelitian penulis juga memiliki keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian hal ini yang menjadikan perlu kiranya ada pembatasan masalah.

Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Urung purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. Adapun pendidikan yang akan diteliti oleh peneliti ialah :

1. Pendidikan Dasar : Sekolah Menengah Pertama(SMP)
2. Pendidikan Menengah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
3. Pendidikan Tinggi : S1

1.4. Rumusan masalah

Perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Selain itu

dalam perumusan masalah yang jelas akan memenuhi kriteria yang memuaskan untuk mengeluarkan data dari objek penelitian. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam pelaksan pilkada sebagaimana wujud dari sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, berdasarkan penelitian ini dan latar belakang maka perumusan masalah yang akan di bahas adalah : Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2015 Di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

1.5. Tujuan dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merupakan rangkuman kalimat yang memuat pernyataan yang menunjukkan adanya hal yang di peroleh setelah penelitian kerjakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2015 di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat – manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi masyarakat

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilu.

3. Bagi almamater

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

